

II

Penganekaragaman Pangan dan Politik Pangan Indonesia

*Dr. Bayu Krisnamurthi **

Pengantar

Pangan merupakan kebutuhan pokok terpenting bagi kehidupan manusia, setelah udara dan air. Tanpa pangan manusia tidak dapat hidup, bahkan tanpa pangan yang baik manusia tidak dapat hidup layak. Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi untuk setiap manusia, yang harus dihormati dan mendapat kesempatan untuk diwujudkan. Disamping itu, dalam berbagai tatanan sosial-ekonomi-kultural bahkan religius, memastikan bahwa manusia mampu memenuhi kebutuhan pangannya juga merupakan kewajiban azasi, baik bagi individu manusia sebagai anggota masyarakat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini seharusnya menjadi dasar berpikir – dan bersikap – dalam setiap diskusi mengenai pangan. Pangan tidak dapat hanya dipandang sebagai ‘komoditi’ atau sebuah aktivitas mata pencaharian. Pangan harus dilihat sebagai salah satu esensi kehidupan manusia.

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu", (Undang-undang nomor 7, tahun 1996 tentang Pangan). Definisi ini mengandung empat unsur penting yaitu: (i) ketersediaan, (ii) (jenis) mutu dan gizi yang layak, (iii) keamanan; dan (iv) keterjangkauan pangan.

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan setiap waktu merupakan dimensi pertama ketahanan pangan. Pencapaiannya harus

* *Dr. Bayu Krisnamurthi adalah Kepala Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor dan anggota pengurus Forum Kerja Penganekaragaman Pangan.*

memperhatikan aspek produksi pangan, pengaturan dan pengelolaan stok atau cadangan pangan, serta penyediaan dan pengadaan pangan yang mencukupi.

Ketahanan pangan juga harus menjaga mutu dan gizi yang baik untuk dikonsumsi oleh publik. Mutu dan gizi yang baik dihasilkan dari pangan yang beragam, bergizi, bermutu baik dan bermartabat untuk dikonsumsi. Kemartabatan pangan untuk dikonsumsi seringkali terlupakan atau tidak banyak diketahui, sehingga sering terjadi keterbalikan pendapat umum mengenai pangan yang bermartabat dan layak untuk dikonsumsi. Pangan yang sering dikonsumsi dan diimpor dari negara industri umumnya dianggap makanan yang mahal dan bergengsi, dan sebaliknya makanan tradisional/indigenus sering diabaikan dan dianggap inferior. Namun pada kenyataannya, pangan yang diimpor dapat berupa makanan yang dianggap buangan oleh negara asal tersebut (sebagai contoh paha ayam di Amerika Serikat), dan sebaliknya makanan tradisional Indonesia (seperti tiwul dan bassang) merupakan makanan yang secara kultural "pemerah" menduduki 'posisi' yang sangat terhormat (menjadi makanan raja-raja) yang sekarang sering dipandang sebagai makanan untuk kaum marginal dalam keadaan terpaksa. Pandangan publik seperti ini masih berlaku dan harus diluruskan untuk dapat lebih memajukan penganekaragaman pangan dan mencapai ketahanan pangan nasional.

Aspek keamanan pangan pada ketahanan pangan harus sesuai dengan kaedah-kaedah dan standar yang berlaku, serta tidak dapat dikompromikan. Makanan untuk dikonsumsi tunduk dan mengikuti standar keamanan, kesehatan, dan nilai religius yang telah distandardkan atau ditentukan oleh badan yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan – BPOM dan Majelis Ulama Indonesia – MUI untuk aspek kehalalan pangan. Aspek ini juga memerlukan unsur dan misi pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaturan pembelian mengutamakan pemenuhan gizi yang baik.

Aspek terakhir yang harus dipenuhi untuk pencapaian ketahanan pangan nasional ialah ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau bagi seluruh populasi Indonesia. Hal ini menjadi sangat menentukan mengingat Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan masih ribuan pulau yang belum memiliki sarana transportasi yang baik. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang merata menuntut sistem distribusi nasional yang baik, handal dan efisien untuk memungkinkan terjangkaunya pangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan dan daya beli.

Kemandirian Pangan

Ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan dapat dicapai jika kemandirian pangan dapat diwujudkan. Kemandirian pangan tidak harus berarti swasembada dalam produksi semua komoditas pangan, melainkan mampu mengurangi atau bahkan tidak bergantung pada pihak lain. Ketergantungan pada pihak asing yang selama ini terjadi berpengaruh secara nyata pada banyak segi, diantaranya pasokan bahan baku komoditas pangan, teknologi pengolahan dan proses, dan pola konsumsi masyarakat. Bahkan secara tidak langsung ketergantungan pangan pada pihak asing dapat mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam pengambilan keputusan dan sikap yang erat kaitannya dengan aspek politik, ekonomi hingga pertahanan dan keamanan.

Jika dikaitkan dengan teori awal bahwa dominasi global dapat menggunakan pangan sebagai instrumen politik, maka mewujudkan kemandirian pangan sangat bernilai melebihi hanya sebagai cara mencapai ketahanan pangan. Kemandirian pangan sangat diperlukan untuk tetap dapat menjaga kedaulatan dan integritas politik bangsa. Pemasokan bahan baku dan impor komoditas pangan dari luar negeri dapat disikapi dengan lebih mandiri dan tidak bergantung pada satu negara, untuk komoditas pangan.

Penganekaragaman Pangan

Keanekaragaman pangan pada dasarnya merupakan fondasi dari ketahanan pangan. Bermula dari pandangan ahli gizi yang menyatakan bahwa pangan yang beragam akan lebih dapat memenuhi kebutuhan gizi manusia, keanekaragaman pangan juga memiliki dimensi lain bagi ketahanan pangan. Bagi produsen, Keanekaragaman pangan (diversifikasi pangan) akan memberi insentif pada produksi yang lebih beragam, termasuk produk pangan dengan nilai ekonomi tinggi dan pangan berbasis sumberdaya lokal. Sedangkan jika ditinjau dari sisi konsumen, konsumsi dan pangan yang dikonsumsi menjadi lebih beragam, bergizi, bermutu dan bermartabat. Disamping itu, dilihat dari kepentingan kemandirian pangan, penganekaragaman pangan juga dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis bahan pangan.

Masalah-masalah Besar dan Ketahanan Pangan

Masalah ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari berbagai masalah-masalah besar dalam skala nasional lainnya. Penyelesaian satu masalah akan dapat berakibat pada penyelesaian masalah berikutnya. Masalah-masalah besar dimaksud adalah:

1. **Kemiskinan.** Ketidakmampuan atau keterbatasan masyarakat dalam memperoleh pendapatan dan kesejahteraan akibat berbagai hal. Kemiskinan ini kemudian menyebabkan sangat terbatasnya kemampuan dalam menjangkau pangan, walaupun jumlah pangan cukup tersedia.
2. **Daya dukung alam.** Peningkatan jumlah penduduk, berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam (lahan) untuk kegiatan pertanian, dan menurunnya kondisi SDA lain (air) sangat menentukan kemampuan produksi pangan. Masalah-masalah seperti konversi lahan dan kompetisi penggunaan SDA untuk penggunaan pertanian dan non-pertanian menjadi masalah yang kian serius.
3. **Peningkatan penduduk.** Indonesia memiliki laju pertumbuhan penduduk sekitar 1.5% per tahun, walaupun sebenarnya bukan merupakan tingkat pertumbuhan yang tertinggi, namun berarti terdapat tambahan lebih dari 3 juta penduduk setiap tahun yang perlu mendapatkan pangan. Hal ini merupakan masalah dasar yang menuntut peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan.
4. **Pola hidup dan konsumsi.** Pola hidup masyarakat yang pada sebagian kelompok relatif boros dan berlebih, sedangkan pada kelompok lain kekurangan, dan pada kelompok lain tanpa pemahaman yang benar atas pola hidup dan konsumsi yang sehat akan sangat berpengaruh terhadap sikap konsumen pangan. Hal ini termasuk pola hidup (pola pangan) yang menimbulkan ketergantungan pada bahan pangan tertentu.
5. **Globalisasi dan agenda dominasi.** Penguasaan pangan pasar atau 'agenda dominasi' dengan berbagai bentuk dan implementasinya memberikan kesimpulan logis bahwa penguasaan atas pangsa pasar pangan akan sangat ampuh menjadi instrumen dalam memenangkan persaingan global.

Berkaitan dengan hal diatas, kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius, dimana jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak dari seluruh penduduk Malaysia, Singapura dan Brunei dijumlahkan, seperti yang tertera pada Tabel 4. di bawah ini.

Tabel 4. Jumlah Penduduk miskin di Indonesia.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)		
	Desa	Kota	Desa + Kota
1990	17,8	9,4	27,2
1996	15,3	7,2	22,5
1998	31,9	17,6	49,5
2000	26,4	12,3	38,7
2002	25,1	13,3	38,4

Disisi lain, sektor pertanian (yang didominasi oleh kegiatan produksi dan distribusi pangan) telah menunjukkan peran yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan di sektor pertanian Indonesia merupakan kontributor terbesar dalam menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan pertanian mampu mengurangi kemiskinan sebanyak 55% untuk daerah perkotaan dan 74% untuk daerah pedesaan, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan pertanian Indonesia dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia sebanyak 66% (Smeru, 2003).

Dalam kaitannya dengan masalah ketersediaan sumberdaya alam, pertumbuhan di sektor pertanian Indonesia memiliki berbagai masalah dan hambatan. Salah satunya yang cukup serius adalah konversi lahan produktif pertanian. Pusat Studi Pembangunan IPB (2001) mencatat terjadinya peningkatan konversi lahan pertanian dari 36.500 hektar per tahun (periode 1983-1993) menjadi 50.500 hektar per tahun pada periode 1993-1997. Untuk tahun 1997-2000 diperkirakan konversi lahan tetap terjadi secara ekstensif, sebesar 22.000 hektar per tahun. Angka-angka tersebut merupakan rata-rata dari perkiraan tertinggi dan terendah di Pulau Jawa, serta tidak termasuk konversi lahan hutan menjadi "non-hutan non-pertanian". Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5. berikut.

Tabel 5. Konversi Lahan Pertanian Jawa dan Bali.

	Periode konversi lahan (hektar/tahun)		
	1983-1993	1993-1997	1997-2000
Perkiraan			
Perkiraan Tinggi	45.000	61.000	48.000
Perkiraan Rendah	28.000	40.000	22.000
Rata-rata	36.500	50.500	35.000

Konversi lahan merupakan masalah yang sangat serius terjadi secara terus menerus di pulau Jawa dan Bali. Hal ini diakibatkan oleh pembangunan yang terpusat dan penyebaran penduduk yang terlalu

berkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali. Sehingga lahan pertanian dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan lain yang mendesak seperti perumahan dan keperluan perekonomian penduduk. Pulau Jawa memang mengandung tanah vulkanik yang sangat subur dan menjadi pemasok utama kebutuhan pangan penduduk se-Indonesia. Sebagai contoh pulau Jawa menjadi penghasil 56% komoditas padi Indonesia dan hampir 90% susu untuk seluruh penduduk Indonesia. 'Ketergantungan' pada pulau Jawa dan dominasi wilayah padat penduduk dalam produksi pangan dapat menimbulkan masalah tersendiri.

Pengaruh globalisasi dalam perdagangan pangan bukan merupakan hal yang sederhana. Data dari *Food and Agriculture Organisation of the UN (FAO)* menunjukkan perkiraan jumlah penduduk dunia pada tahun 2030 mencapai 8 miliar. Pada tahun 2015, sebanyak 580 juta penduduk dunia akan mengalami kekurangan pangan. Perhitungan itu juga menunjukkan bahwa negara-negara berkembang di dunia akan semakin tergantung pada impor komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang sangat besar, dan diperkirakan kebutuhan tersebut akan meningkat dari 170 juta ton pada tahun 1995 menjadi 270 juta ton pada tahun 2030 kelak. Namun ironisnya, ekspor komoditas pangan negara-negara industri (maju) juga mengalami peningkatan dari 142 juta ton (1995) menjadi 280 juta ton (2030). Dengan demikian tergambarkan ketergantungan negara-negara berkembang pada negara-negara maju akan kebutuhan mendasar, yaitu pangan, sehingga memungkinkan dan memudahkan komoditas pangan dijadikan komoditas dan senjata politik untuk pengaturan hingga terjadinya dominasi dunia.

Arti Penting (Lain) Penganekaragaman Pangan

Strategi Penganekaragaman pangan – disamping memiliki arti sangat esensial bagi peningkatan mutu gizi pangan masyarakat – ternyata juga memiliki arti penting lain jika dikaitkan dengan berbagai masalah besar diatas. Penganekaragaman pangan mempunyai berbagai dampak yang harus diperhatikan pada beberapa aspek sosial, terutama yang memberi dampak pada dua golongan utama masyarakat yaitu: Produsen dan Konsumen. Aspek sosial penting tersebut meliputi:

1. **Kemiskinan.** Akibat dari kemiskinan dapat diringankan dengan penganekaragaman pangan, dimana konsumen diberikan alternatif bahan pangan yang mudah dan terjangkau; juga memberi kesempatan untuk produsen mengusahakan yang lebih menguntungkan.

2. **Daya dukung alam.** Penganeekaragaman pangan memungkinkan sumberdaya alam dipergunakan lebih optimal oleh produsen sesuai dengan tingkat kesesuaian sumberdaya lokal.
3. **Peningkatan penduduk.** Tuntutan kebutuhan pangan akibat peningkatan penduduk dapat diatasi dengan menganekaragamkan pangan, dimana produsen dapat mengoptimalkan sumberdaya yang tidak berkompetisi dengan kebutuhan lain. Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan pangan, konsumen harus mulai sadar bahwa terdapat lebih banyak alternatif pangan yang tersedia.
4. **Pola hidup dan pola konsumsi.** Penganeekaragaman pangan memberikan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan bermutu, dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan, misalnya ketergantungan pada beras.
5. **Globalisasi.** Menghadapi tantangan globalisasi, penganeekaragaman pangan memberi peluang bagi produsen memproduksi pangan unik dan spesifik lokal yang lebih memiliki keunggulan dengan spesifikasi tersebut. Sedangkan penerapan penganeekaragaman pangan untuk konsumen dapat kembali mengurangi ketergantungan pada pangan tertentu, terutama yang bersifat impor dan asing.

Ketahanan dan kemandirian pangan memang sangat erat berhubungan dengan kemiskinan penduduk, jumlah penduduk, daya dukung alam, pola hidup dan konsumsi, serta dipengaruhi oleh berkembangnya globalisasi. Hubungan tersebut adalah hubungan sebab akibat dua arah dan saling memberi dampak. Dan dalam kaitan itu, penganeekaragaman pangan menjadi salah satu usaha untuk menuju pencapaian tujuan nasional di bidang pangan tersebut.

Evaluasi Hingga Saat Ini dan Melihat ke Depan: Aspek Politik Pangan

Tingkat kepentingan pangan yang sangat tinggi bagi kehidupan masyarakat, menjadikan pangan memiliki dimensi politik yang – disadari atau tidak – sangat signifikan. Dengan demikian, perkembangan yang terjadi pada kondisi pangan mau tidak mau harus dilihat juga dalam konteks politik, atau dalam hal ini politik pangan.

Kondisi dan berbagai perangkat kebijakan pangan saat ini telah berubah dan membutuhkan langkah-langkah strategis baru dalam penanganan pangan. Untuk menghadapi tantangan dan sistem pasar pangan dunia, mewujudkan ketahanan pangan nasional menjadi penting. Dalam hal ini ketahanan pangan untuk Indonesia merupakan satu

kesatuan yang terdiri dari tiga elemen penting. Tiga elemen tersebut meliputi Ketahanan Pangan tingkat Rumah Tangga, tingkat Wilayah dan tingkat Nasional, dimana saling sangat erat berkaitan dan harus dapat diwujudkan guna mencapai ketahanan pangan secara keseluruhan.

Sistem ketahanan pangan dan perwujudannya dinilai sangat penting dalam rangka mewujudkan kemandirian untuk menghadapi pasar pangan dunia. Hal ini mendesak dilakukannya rekonstruksi kebijakan pangan secara menyeluruh, disesuaikan dengan kondisi aktual saat ini, dan harus dapat mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang.

Langkah-langkah kebijakan pangan nasional sudah sebagian mengalami rekonstruksi dan perubahan, tetapi masih jauh dari yang diharapkan. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang menjadi acuan Departemen Pertanian, membuka perspektif baru bahwa ternyata 70% urusan penanganan masalah pertanian justru berada di luar Departemen Pertanian. Disamping itu, agenda desentralisasi baru menjanjikan potensi, namun sudah menimbulkan banyak masalah. Masalah "parsialisme" antar sektor/instansi, pusat dan daerah, antar daerah, serta rencana jangka pendek dan panjang yang terjadi menjadi semakin serius.

Kesemua itu membutuhkan arahan politik pangan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Terlebih bila dilihat dari perjalanan proses 'sejarah' politik pangan yang sebelumnya didominasi oleh "beras-isasi" Akibat pengaruh "Politik Beras" tersebut, beras menjadi sangat penting dan menjadi standar satuan untuk berbagai hal. Sebagai contoh, gaji Pegawai Negeri sipil dan TNI pernah sebagian diberikan dalam bentuk beras, standar ukuran untuk kemiskinan di Indonesia berdasarkan konsumsi dan daya beli terhadap beras, cadangan pangan, program Bimas, bahkan ukuran keberhasilan kepala daerah juga berdasarkan kuantitas beras.

Politik beras kemudian juga berkait dengan "Politik Swasembada (beras)". Pengaruh "Politik Swasembada" yang didasari pada pendekatan produksi (produksi sama dengan konsumsi) telah sangat mempengaruhi pola pikir pembangunan pangan, sekaligus berbagai program, institusi, dan infrastruktur yang dikembangkan. Disamping itu, politik beras dan politik swasembada juga telah menempatkan peran pemerintah yang besar. Dominasi peran pemerintah kemudian terkait pula dengan penciptaan sistem dan elemen yang serba seragam, serba menjadi "proyek" pemerintah, dan semua serba terpusat. Hal ini kemudian terkait dengan masalah serius "moral hazard" para pengambil keputusan, mulai dari tingkat yang tinggi hingga petugas operasional. Secara sistematis, bidang impor dan distribusi dikuasai dan menjadi lahan usaha untuk pengusaha (usaha) besar, sedangkan produksi komoditas pangan diserahkan kepada petani kecil. Kolusi yang terjadi

antara penguasa dan pengusaha menghasilkan inefisiensi, biaya tinggi, misalokasi, dan berbagai masalah lain.

Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang dalam mengembangkan politik pangan. Apabila pelajaran sejarah tersebut ditarik mulai dari jaman kolonial hingga masa transisi reformasi saat ini, maka 'peta' politik pangan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 6. berikut.

Tabel 6. Sejarah Politik Pangan di Indonesia.

Unsur Politik Pangan	Kolonial	Orde Lama	Orde Baru	Reformasi
Political Consciousness	Eksplotasi	Kemerdekaan	Stabilisasi	Desentralisasi
Political Will	Kolonialisasi	Nasionalisasi	Swasembada, stabilitasi harga, pangan murah, insentif bagi petani "memadai"	Desentralisasi, Globalisasi, Proteksi dan Promosi?
Political decision	Tanam paksa, perusahaan besar bersenjata (VOC)	Nasionalisasi perkebunan, <i>land reform</i> ?	Serba pemerintah, seragam, terpusat	Inpres 9/2001&2002; TAP MPR 5/2003
Political Action	Kuli perkebunan	Pembangunan semesta berencana	Bimas berikut perangkatnya	??

Tabel 6. tersebut menunjukkan bahwa kebijakan (operasional) dalam pangan dan pertanian memang sangat dipengaruhi oleh kesadaran, pemahaman dan penempatan politik (political consciousness), kemauan politik, keputusan politik, dan 'aksi' politik; yang kemudian memandu berbagai kebijakan operasional tersebut.

Prakiraan sementara Politik Pangan pasca Pemilu 2004 meliputi berbagai aspek. Aspek pertama adalah bentuk komitmen partai-partai dan capres terhadap pangan dan pertanian beragam. Banyak aspek dalam "janji partai politik" yang masih berada pada tataran isu-isu "tradisional" dan belum operasional. Hal penting yang perlu diingat dan diperhatikan adalah pada calon legislatif (DPR, DPD, DPRD) sebagian

besar tidak memiliki *track record* dibidang pangan dan pertanian. Serta pemahaman terhadap pangan dan pertanian masih berkisar pada orientasi jangka pendek yang bersifat tahunan. Oleh karena itu, para profesional bidang pangan dan pertanian perlu mengedukasi para pengambil keputusan.

Kebutuhan membangun politik pangan dan pertanian adalah memposisikan pangan dan pertanian secara proporsional dalam struktur ekonomi Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan. Perdagangan internasional pangan dan pertanian juga perlu dijadikan pertimbangan untuk hal ini. Juga keagrarian, kegiatan produksi pertanian dan distribusi, pasar dan harga produk pertanian.

Berkaitan dengan hal tersebut, usaha mengatasi masalah pangan dimulai dengan diadakan perubahan paradigma berpikir untuk posisi pangan dan pertanian di sistem kehidupan Indonesia. Pandangan konvensional yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun adalah bahwa perkembangan kemajuan suatu bangsa, khususnya negara industri, diawali dengan membangun dan memperkuat pertanian sebagai tahapan awal. Setelah sektor pertanian terbentuk dengan kuat, maka tahapan pembangunan selanjutnya adalah pembentukan industri untuk menggerakkan roda perekonomian bangsa, yang dilanjutkan atau dikomplementer oleh bidang jasa.

Pemikiran ini sudah terasa 'ketinggalan jaman' dan banyak membuat masalah di Indonesia karena pengembangan industri dan jasa yang meninggalkan pertanian bertentangan dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk masih di pertanian. Jika pemikiran itu dilanjutkan, sama saja dengan berpikiran untuk 'meninggalkan' sebagian besar penduduk. Pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan prinsip demokrasi tidak memperbolehkan hal tersebut terjadi. Disisi lain, kenyataan yang terjadi di negara Industri adalah pertanian tetap maju karena pembangunan dilakukan secara terintegrasi. Pertanian dimajukan bersama dengan industri dan jasa secara paralel, bukan bertahap dan berurutan. Pola pemikiran seperti inilah yang harus mulai ditanamkan pada bangsa kita.

Kejelasan dan ketegasan politik dalam pangan dan pertanian diperlukan untuk rekonstruksi kebijakan nasional yang dapat menjawab tantangan kemandirian pangan dan mewujudkan ketahanan pangan di masa sekarang dan masa mendatang. Politik pangan dan pertanian harus dilandasi pokok pemikiran bahwa pangan dan hasil pertanian bukan hanya soal "produk" yang ada di pasar, tetapi bersifat aset dengan pengaruh dan dampak yang lebih luas. Pandangan dan pendekatan terhadap pangan dan pertanian mencakup peranan untuk mengurangi kemiskinan, menunjang daya tahan ekonomi bangsa, mengelola pelestarian lingkungan, mewujudkan ketahanan pangan,

hingga aspek kesinambungan identitas dan "nilai" norma-sosial-budaya bangsa, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan bangsa.

Konsistensi kebijakan dan program pembangunan sosio-ekonomi nasional meliputi berbagai halo Proteksi dan sistem tertutup harus mulai terbuka dan bersamaan dilakukan promosi pangan, produksi pertanian hingga pertanian Indonesia. Kebijakan dibuat secara terintegrasi dan disiplin dalam kebijakan pusat dan daerah, dalam dan luar bidang pertanian, kebijakan untuk kepentingan domestik dan kaitannya dengan internasional, serta integritas peran pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Pembangunan sosio-ekonomi perlu dilakukan melalui pendekatan peningkatan pendapatan bukan lagi peningkatan produksi dengan perencanaan berorientasi antisipasi terhadap trend masa datang, serta memberikan apresiasi dan mendorong pengembangan keragaman dalam bidang pangan maupun pertanian.

Langkah terakhir adalah diperlukannya terobosan teknologi, organisasi dan sumber daya manusia. Terobosan teknologi sangat dibutuhkan untuk konsentrasi pada masalah pengurangan - kehilangan pasca-panen serta peningkatan nilai produk. Sehingga sebuah konsep agroindustrialisasi pedesaan perlu dikembangkan dan diterapkan. Dalam pengembangan konsep dan usaha ini, pemanfaatan dan pengembangan lahan kering dan "*non land-base agriculture*" perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam konteks penganekaragaman pangan, perlu pendekatan industrial produk tepung yang berbasis pada bahan baku lokal, dan jelas sekali dibutuhkan teknologi khusus untuk menangani penepungan berbagai bahan baku lokal yang spesifik. Aplikasi terobosan teknologi secara luas memerlukan penyuluhan dan promosi sehingga penguatan dan pengembangan serta pengaitan penyuluhan dengan R&D (*Research and Development*) menjadi esensial. Selain terobosan teknologi, dibutuhkan juga terobosan yang signifikan dalam penguatan kemampuan negosiasi internasional serta kemampuan penegakan dan negosiasi hukum.

Daftar Pustaka

- ADB (2003), "Agriculture and Rural Development Strategy Study", Interim Report, ADB TA No. 3843-INO.
- Alexandratos, N (1995), *World Agriculture: Towards 2010, An FAO Study*, published by FAO and John Willey & Sons: Chichester
- Banerjee, A and H. Siregar (2002), "Agriculture As the Leading Sector: An Industrial Policy Framework", Working Paper Series no.02/02, UNSFIR
- Bruinsma, J (2004), "Prospects for World Agriculture and Their Implications for Indonesia", paper presented at the Thematic Workshop on Agriculture Policy for The Future", organised by Bappenas, FAO and UNDP (project UNSFIR), Jakarta 12-13 February 2004.
- Gulati, A dan S. Narayanan (2002), "Rice Trade Liberalization and Poverty", MSSD Discussion Paper no. 51, IFPRI
- IFPRI (2003), "Revitalizing the Drive for Rural Infrastructure", *IFPRI Forum*, September. Available on line at www.ifpri.org/pubs/newsletters/ifpriforum/if200309.htm
- Kasryno, F (2004), "The Linkage Between Agriculture Development, Poverty Alleviation and Employment", paper presented at the Thematic Workshop on Agriculture Policy for The Future", organised by Bappenas, FAO and UNDP (project UNSFIR), Jakarta 12-13 February 2004.
- Krisnamurti, B., F. Agus S. Sumarto, A. Idrayono, E. Pasandaran, and I.M. O. Manikmas (2004), "A Socio Economic and Policy Analysis of the Role of Agriculture in Indonesia", National Synthesis Report for FAO
- Krisnamurthi, B. 2004. Road Map Pembangunan Pertanian. KPEN Kadin Indonesia.
- McCulloch, N (2004), "Trade and Poverty in Indonesia: What Are The Links", paper presented at the Thematic Workshop on Why Trade and Industry Policy Matters? organised by Bappenas, Deperindag and UNDP (project UNSFIR), Jakarta 14-15 January 2004.
- Mellor, J (2004), "Putting Agriculture Back in The Development Framework", paper presented at the Thematic Workshop on Agriculture Policy for The Future", organised by Bappenas, FAO and UNDP (project UNSFIR), Jakarta 12-13 February 2004.

- Ravallion, M(1995), "Growth and Poverty: Evidence for the Developing World", *Economics Letters*
- Rosegrant, M.W, M. Agcaoili-Sombilla, and N.D. Perez (1995), "Global Food Projections to 2020: Implications for Investment", *Food, Agriculture, and the Environment Discussion Paper no.5*, IFPRI: Washington DC.
- Simatupang, I.W. Rusastra, and M. Maulana (2004), "How to Solve Supply Bottleneck in Agricultural Sector", paper presented at the Thematic Workshop on Agriculture Policy for The Future", organised by Bappenas, FAO and UNDP (project UNSFIR), Jakarta 12-13 February 2004.
- Simatupang, P dan A. Purwoto (1990), "Pengembangan Agro Industri sebagai Penggerak Pembangunan Desa" dalam P. Simatupang dkk (eds.), *Agro Industri Faktor Penunjang Pembangunan Pertanian di Indonsia*, PSE Badan Litbang Pertanian: Bogor
- Tabor, S.R, M.H Sawit, and HS Dillon (2002), "Indonesian Rice Policy and the Choice of a Trade Regime for Rice in Indonesia", report prepared for a roundtable workshop, hosted by INDEF at LPEM UI, Jakarta, 11 Maret